



Peran Kebijakan Fiskal dalam Mendorong Pertumbuhan UMKM di Indonesia

Muhammad Syahrudin Hidayat^{1*}, Rafa Septiyana², Sefta Monaliza³

^{1,2,3} Akuntansi Syariah, Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan
Lampung, Indonesia

adin70910@gmail.com^{1*}, rafaseptiana204@gmail.com², septa3272@gmail.com³

Korespondensi penulis: adin70910@gmail.com

Abstract: *Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) play an important role in the Indonesian economy as labor absorbers and drivers of the local economy. However, this sector often faces various challenges such as limited access to financing, infrastructure, and policy support. This study aims to analyze the role of fiscal policy in encouraging the growth of MSMEs in Indonesia. The methods used are literature studies and secondary data analysis from various official sources, including government reports and national statistical data. The results of the study indicate that fiscal policy instruments such as tax incentives, subsidies, and state spending for MSME empowerment programs have a positive impact on increasing MSME productivity and competitiveness. However, the effectiveness of these policies is highly dependent on targeted implementation and synergy between related institutions. Therefore, a more inclusive, transparent, and adaptive fiscal policy formulation is needed to encourage sustainable economic growth*

Keywords: *economic growth, Fiscal policy, MSMEs, subsidies, tax incentives*

Abstrak: Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memegang peranan penting dalam perekonomian Indonesia sebagai penyerap tenaga kerja dan penggerak ekonomi daerah. Namun, sektor ini kerap kali menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan akses pembiayaan, infrastruktur, dan dukungan kebijakan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran kebijakan fiskal dalam mendorong pertumbuhan UMKM di Indonesia. Metode yang digunakan adalah studi pustaka dan analisis data sekunder dari berbagai sumber resmi, termasuk laporan pemerintah dan data statistik nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa instrumen kebijakan fiskal seperti insentif pajak, subsidi, dan belanja negara untuk program pemberdayaan UMKM berdampak positif terhadap peningkatan produktivitas dan daya saing UMKM. Namun, efektivitas kebijakan tersebut sangat bergantung pada implementasi yang tepat sasaran dan sinergi antar lembaga terkait. Oleh karena itu, diperlukan formulasi kebijakan fiskal yang lebih inklusif, transparan, dan adaptif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Kata kunci: pertumbuhan ekonomi, Kebijakan fiskal, UMKM, subsidi, insentif pajak

1. PENDAHULUAN

Kebijakan fiskal merupakan salah satu instrumen penting dalam upaya mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia. Kebijakan ini berperan dalam mempengaruhi permintaan agregat dalam jangka pendek dan juga memberikan dampak jangka panjang terhadap penawaran agregat, melalui peningkatan kapasitas perekonomian secara keseluruhan. Pertumbuhan ekonomi, yang tercermin dalam peningkatan output dari waktu ke waktu, adalah salah satu indikator utama untuk mengukur keberhasilan pembangunan suatu negara.

Kebijakan fiskal sendiri melibatkan pengelolaan pengeluaran pemerintah dan pengaturan tarif pajak untuk memantau serta mempengaruhi aktivitas perekonomian. Kebijakan ini berbeda dengan kebijakan moneter, di mana otoritas moneter, seperti bank

sentral, mempengaruhi jumlah uang yang beredar di suatu negara. Di Indonesia, sistem kebijakan fiskal telah mengalami banyak perubahan dari masa ke masa, mulai dari era Orde Lama, Orde Baru, hingga era reformasi saat ini. Perubahan tersebut dilakukan untuk menjaga stabilitas ekonomi di tengah dinamika global dan domestik. Sebagai contoh, kebijakan anggaran berimbang yang diterapkan pada masa Orde Baru bertujuan untuk menangani masalah hiper-inflasi yang melanda negara pada saat itu.

Pengaruh signifikan kebijakan fiskal terhadap perekonomian pertama kali dikemukakan oleh John Maynard Keynes. Keynes menekankan bahwa peningkatan pengeluaran pemerintah tidak hanya memindahkan sumber daya dari sektor swasta ke sektor publik, tetapi juga dapat menghasilkan dampak berganda atau multiplier effect, di mana peningkatan pengeluaran pemerintah mendorong peningkatan aktivitas ekonomi secara keseluruhan. (Maria, Anne 2009).

Secara konvensional kebijakan fiskal dimaksudkan sebagai alat rekayasa pemerintah dalam perekonomian yang menganut mekanisme pasar bebas yang diharapkan dapat mempengaruhi jalannya aktivitas perekonomian suatu negara. Menurut Wolfson sebagaimana dikutip Suparmoko, kebijakan fiskal (fiscal policy) merupakan tindakan-tindakan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan umum melalui kebijakan penerimaan dan pengeluaran pemerintah, mobilisasi sumberdaya, dan penentuan harga barang dan jasa dari perusahaan. Sedangkan Samuelson dan Nordhaus menyatakan bahwa kebijakan fiskal adalah proses pembentukan perpajakan dan pengeluaran masyarakat dalam upaya menekan fluktuasi siklus bisnis, dan ikut berperan dalam menjaga pertumbuhan ekonomi, penggunaan tenaga kerja yang tinggi, bebas dari laju inflasi yang tinggi dan berubah-ubah. Kebijakan fiskal dalam negara Indonesia tercermin dari APBN, dimana dapat mengatur inflasi agar tidak terjadi krisis moneter, membangun ekonomi dengan pertumbuhan yang signifikan dan merata.

Pertumbuhan ekonomi sangat berpengaruh pada kebijakan fiskal yang terwujud dalam APBN. Ketika APBN digunakan sesuai dengan waktu dan tempat yang tepat maka inflasi akan terkendali dengan baik sehingga berdampak pada pertumbuhan yang signifikan dan merata dalam ruang lingkup makro yaitu negara. Dasar kebijakan fiskal secara umum bertujuan untuk pemerataan pendapatan dan kesejahteraan. Akan tetapi, kesejahteraan dalam Islam mencakup kesejahteraan material dan spiritual. Oleh karena itu, nilai-nilai moral harus selalu mendasari dalam setiap kebijakan fiskal. Menurut J. Chelliah, tujuan kebijakan fiskal berikut harus diupayakan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang cepat, yakni : 1. Tingkatkan hubungan antara tabungan dan pendapatan (y) terhadap

konsumsi. 2. Tingkatkan investasi 3. Menggerakkan aliran beban atau biaya yang efisien 4. Minimalkan kesenjangan kekayaan dan pendapatan yang signifikan (Azizah et al., 2024).

Peran kebijakan fiskal dalam mendorong pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia sangat penting, terutama melalui instrumen seperti insentif pajak, subsidi, serta peningkatan belanja pemerintah yang diarahkan pada pengembangan sektor UMKM. Kebijakan fiskal dapat menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif dengan menurunkan beban pajak, memberikan akses pembiayaan yang lebih murah, dan meningkatkan permintaan terhadap produk UMKM melalui pengadaan barang dan jasa pemerintah (Susilo Utomo 2020).

Kebijakan fiskal memiliki peran strategis dalam mendukung pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. pemerintah berupaya meningkatkan porsi kredit UMKM di sistem perbankan dari sekitar 20% menjadi 30% pada tahun 2024. Untuk itu, pemerintah mendukung kolaborasi antara UMKM dan perusahaan teknologi finansial (fintech) guna memperkuat inklusi keuangan. Melalui course "Commerce Coordinating & Investigation Session Between MSMEs and Fintech" yang diselenggarakan pada 22 Agustus 2023, pemerintah memfasilitasi pertemuan antara pelaku UMKM dan penyedia layanan fintech untuk saling berinteraksi, bertukar pengetahuan, dan mengeksplorasi peluang kolaborasi. Selain itu, dalam menghadapi tantangan ekonomi worldwide, pemerintah terus menunjukkan komitmen kuat untuk mendukung keberlanjutan UMKM. Strategi fiskal menjadi salah satu instrumen utama dalam memastikan UMKM mampu bertahan dan berkembang. Sebagai langkah konkret, pemerintah memberikan perpanjangan masa berlaku tarif pajak penghasilan (PPh) last sebesar 0,5gi wajib pajak orang pribadi (WP OP) UMKM hingga 2025. Selain itu, pemerintah membebaskan pembayaran PPh bagi UMKM dengan omzet di bawah Rp500 juta per tahun. Kebijakan ini tidak hanya meringankan beban pajak, tetapi juga memberikan ruang bagi UMKM untuk mengalokasikan sumber daya mereka guna meningkatkan produktivitas (Adi budiarso 2023).

Dalam konteks ekonomi Indonesia, ketidaksetaraan tetap menjadi tantangan krusial yang memengaruhi pembangunan. Menyoroti ketidaksetaraan tersebut sebagai isu utama yang tidak bisa diabaikan. Fenomena ini mencerminkan ketimpangan distribusi kekayaan dan akses terhadap sumber daya. Implikasinya sangat signifikan dalam proses pembangunan ekonomi, karena ketidaksetaraan cenderung menghambat pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, penanganan ketidaksetaraan memerlukan

kebijakan yang terukur dan strategi yang tepat untuk mencapai tujuan pembangunan yang lebih merata dan berkelanjutan bagi masyarakat Indonesia (Agusta 2014).

Meskipun Badan Pusat Statistik Indonesia mencatat penurunan persentase kemiskinan pada awal tahun 2016, riset yang dilakukan oleh Ananda (2020) menunjukkan adanya peningkatan jumlah individu yang hidup dalam kondisi miskin. Temuan ini menyoroti kompleksitas permasalahan yang dihadapi dalam upaya mengurangi kemiskinan. Priyono (2022) menegaskan bahwa pemerintah tidak mengabaikan tantangan tersebut namun menggarisbawahi bahwa solusinya tidaklah sederhana. Hal ini menekankan pentingnya pendekatan yang holistik dan berkelanjutan dalam menanggapi masalah kemiskinan, serta perlunya pemahaman mendalam terhadap konteks sosio-ekonomi Indonesia.

Usaha kecil dan menengah (UMKM) berperan penting kepada perekonomian global. Mereka tidak hanya menjadi tulang punggung perekonomian banyak negara, namun juga sumber utama lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi inklusif serta inovasi. Di banyak negara, UMKM merupakan penggerak utama pembangunan ekonomi, memberi manfaat sosial serta ekonomi untuk masyarakat di berbagai tingkatan (Rizka Handayani 2024).

Namun, dalam konteks ini, banyak faktor, termasuk kebijakan perpajakan, yang mempunyai dampak signifikan terhadap kesehatan dan pertumbuhan UMKM, dan UMKM seringkali menghadapi tantangan tertentu. Meskipun perusahaan-perusahaan tersebut beroperasi dalam skala yang lebih kecil dibandingkan perusahaan-perusahaan besar, perusahaan-perusahaan tersebut sering kali dikenakan beban pajak yang relatif sama atau bahkan lebih tinggi, terutama bila diterapkan secara proporsional terhadap pendapatan dan laba yang dihasilkan

Oleh karenanya, fundamental dalam mempunyai pemahaman secara jelas mengenai bagaimana kebijakan perpajakan berdampak langsung dan tidak langsung terhadap UMKM. Sistem perpajakan dapat menjadi alat yang efektif untuk mendorong tumbuh dan berkembangnya UMKM. Di satu sisi, pajak dapat menjadi sumber pendapatan penting bagi pemerintah dan dapat digunakan untuk mendukung infrastruktur, pelayanan publik, dan program pembangunan lainnya yang bermanfaat bagi UMKM. Di sisi lain, jika kebijakan perpajakan tidak diterapkan secara bijaksana, hal ini dapat memberikan beban yang signifikan pada UMKM, sehingga berdampak pada kemampuan mereka untuk berinvestasi, berkembang, dan bersaing di pasar (Gustira 2024).

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dalam pembuatan jurnal yang berjudul Peran Kebijakan Fiskal dalam Mendorong Pertumbuhan UMKM di Indonesia untuk pembelajaran efektif dan inovatif menggunakan deskriptif kualitatif yang sumber datanya di ambil dari sumber data primer dan sekunder dalam bentuk karya tulis ilmiah, buku-buku yang relevan atau sumber data lain yang sesuai dengan penelitian ini. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui Peran Kebijakan Fiskal dalam Mendorong Pertumbuhan UMKM di Indonesia

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Kebijakan Fiskal Yang Diterapkan Pemerintah Dalam Mendukung UMKM Di Indonesia

Pembiayaan UMKM di era terkini dapat menjadi tulang punggung perekonomian bangsa. Pembiayaan merupakan hal yang penting bagi kegiatan usaha, pengadaan jasa ataupun kegiatan lain dengan modal terbatas. Dengan adanya sistem pembiayaan, maka pembiayaan dapat menjadi solusi dalam mengatasi berbagai kekurangan dalam pemenuhan modal (Muttaqin et al., 2020).

Usaha kecil dan menengah (UKM) menjadi tulang punggung kegiatan ekonomi untuk memulihkan kondisi ekonomi. UMKM memiliki jaringan yang luas di berbagai pelosok tanah air, memungkinkan warganya menjangkau dan mengembangkan potensinya, yang pada gilirannya memungkinkan masyarakat untuk menikmati kehidupan yang lebih baik dan lebih maju. Usaha mikro, kecil, serta menengah (UMKM) adalah sektor yang mempunyai tantangan pengembangan yang amat banyak, mulai dari segi penjualan produk sampai dari segi permasalahan investasi (Irmawati et al., 2013).

Usaha Mikro Kecil serta Menengah yaitu usaha penunjang ekonomi orang yang dijalankan secara mandiri oleh orang perseorangan atau badan hukum yang bukan merupakan anak perusahaan dari suatu industri atau agen industri. Perkara terbanyak UMKM merupakan kesusahan mengakses investasi, pengurusan usaha yang sedang konvensional, mutu SDM yang belum mencukupi, dan rasio serta metode penciptaan yang sedang kecil (Oktafia, 2017).

Oleh sebab itu, buat meningkatkan serta memberdayakan UMKM, dibutuhkan adanya badan financial yang cocok dengan keinginan serta kondisi pelakon ekonomi orang (UMKM) supaya permasalahan permodalan dapat terkendali. Karena fenomena ini, komunitas UMKM paling menderita dari perlambatan perekonomian akibat meluasnya pembatasan sosial yang diberlakukan di beberapa kota di Indonesia. Selain itu, UMKM

yang dibiayai melalui bank akan kesulitan dalam mendistribusikan kewajibannya (Maulidah & Oktafia, 2020).

Perekonomian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peranan yang positif, seperti mengurangi jumlah pengangguran dengan menciptakan lapangan pekerjaan, menyediakan barang dan jasa kebutuhan masyarakat, dan pemeratakan usaha untuk pendistribusian pendapatan nasional. Hal ini menjadi peluang bagi masyarakat yang memiliki kemampuan dalam bidang usaha. Namun faktanya banyak masyarakat belum memiliki modal finansial yang cukup. Para pelaku usaha biasanya memperoleh modal finansial melalui lembaga perbankan. Hal ini dikarenakan akses perbankan saat ini sangat mudah dijangkau baik di kota maupun di desa. Permasalahan-permasalahan klasik pada UMKM umumnya seperti keterbatasan modal dan pemasaran (Hakim, 2019).

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki karakter tersendiri dan berbeda dengan perusahaan yang memiliki skala luas. UMKM biasanya berdiri sendiri atau tidak berada dibawah naungan grub usaha. Selain itu dari segi teknologi, usaha mikro masih tergolong dengan usaha yang menggunakan teknologi rendah atau manual. Adapun karakteristik lainnya adalah pangsa pasar yang telatif sempit. Usaha mikro kecil dan menengah berorientasi kepada masyarakat sekitar karena mereka masih terbatas modal dan akses untuk bantuan permodalan masih cukup sulit didapatkan. Padahal para pelaku usaha juga sangat membutuhkan bantuan permodalan agar usahanya berkembang dan mampu meningkatkan jumlah komoditas (Muheramtohad, 2017).

Pengaruh Kebijakan Fiskal Terhadap Umkm Yang Ada di Indonesia

UMKM, sebagai salah satu sektor vital dalam perekonomian Indonesia, juga mendapatkan manfaat dari kebijakan fiskal. Melalui insentif pajak, subsidi, dan program bantuan, pemerintah dapat memberikan dukungan yang dibutuhkan oleh UMKM untuk bertumbuh, meningkatkan daya saing, serta memperkuat ketahanan ekonomi. Kebijakan fiskal yang mendukung UMKM akan menciptakan lapangan pekerjaan baru, memperkuat sektor ekonomi domestik, dan berperan dalam mengurangi ketimpangan ekonomi antar wilayah (Mightyn dkk., 2022).

Kebijakan fiskal berperan penting dalam pertumbuhan UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) di Indonesia. Kebijakan ini meliputi tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk memengaruhi ekonomi melalui pengaturan pajak, pemberian subsidi, insentif fiskal, dan alokasi anggaran yang bertujuan mendukung sektor UMKM (Tulus tambunan, 2008). Pengaruh Kebijakan Fiskal terhadap Pertumbuhan UMKM:

a. Akses Pembiayaan yang Lebih Mudah

Kebijakan fiskal yang mendukung akses pembiayaan bagi UMKM amat penting, karena banyak pelaku UMKM yang menghadapi kesulitan dalam mendapatkan modal untuk memperluas usaha. Dengan kebijakan seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), pemerintah memberikan peluang bagi UMKM untuk memperoleh pinjaman dengan suku bunga lebih rendah dan prosedur administrative yang lebih mudah. KUR ditujukan untuk mendukung pelaku UMKM yang mengalami kesulitan dalam memperoleh pembiayaan dari bank-bank komersial.

- 1) Bunga rendah dan jangka waktu panjang: Pinjaman KUR memberikan tingkat bunga yang jauh lebih rendah dibandingkan pinjaman konvensional dan menyediakan waktu pelunasan lebih lama, sehingga UMKM memiliki lebih banyak waktu untuk mengembangkan bisnis mereka.
- 2) Jaminan yang minim: Salah satu hambatan utama bagi UMKM dalam mendapatkan kredit adalah isu jaminan. KUR menyediakan kemudahan terkait jaminan, sehingga pelaku UMKM yang belum memiliki cukup aset tetap dapat memperoleh pembiayaan

b. Pengurangan Beban Pajak

Pengurangan beban pajak ialah salah satu alat kebijakan fiskal yang sangat vital untuk mendukung perkembangan dan keberlangsungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Pemerintah Indonesia memahami bahwa banyak UMKM masih kekurangan modal dan sistem akuntansi yang memadai, sehingga relaksasi serta insentif pajak menjadi strategi utama untuk mempercepat dan memastikan pertumbuhan sektor ini secara berkelanjutan

Kebijakan fiskal yang merampingkan sistem pajak dan menawarkan insentif pajak dapat meringankan beban untuk UMKM. Di Indonesia, kebijakan perpajakan yang diterapkan untuk sektor UMKM meliputi pajak penghasilan final sebesar 0,5% bagi UMKM beromzet di bawah Rp 4,8 miliar per tahun, yang memberikan insentif pajak dan mendorong lebih banyak wirausaha untuk beroperasi di sektor formal

c. Insentif Selama Masa Krisis

Insentif selama periode krisis adalah elemen krusial dalam kebijakan fiskal yang bertujuan untuk menyelamatkan dan mempertahankan kelangsungan UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) saat menghadapi tekanan ekonomi, seperti pada masa pandemi COVID-19, krisis global, atau bencana alam. UMKM merupakan sektor yang paling terparah dalam situasi krisis akibat keterbatasan modal, aset, dan agunan

likuiditas. Dan apa yang dimaksud dengan insentif fiskal? Insentif fiskal merupakan jenis kebijakan pemerintah yang menawarkan pelonggaran ekonomi, misalnya: Pengurangan atau pengecualian pajak, Bantuan bunga kredit. Bantuan uang tunai langsung. Pelonggaran prosedur pelaporan pajak Jaminan pinjaman. Tujuannya adalah mendukung pelaku UMKM agar tetap bertahan, menghindari PHK, dan terus memproduksi meskipun terjadi penurunan permintaan yang signifikan

d. Pemberdayaan UMKM Melalui Digitalisasi

Pemerintah Indonesia pun mendukung digitalisasi UMKM sebagai bagian dari kebijakan anggaran. Program ini dirancang untuk memperluas akses UMKM ke pasar yang lebih besar melalui media digital. Insentif pajak berupa pelatihan digital dan subsidi untuk penggunaan teknologi mendukung UMKM dalam memaksimalkan potensi digital mereka. Inisiatif seperti 100 Smart Cities dan UMKM Go Online yang didukung oleh kebijakan fiskal mendorong pelaku UMKM untuk beralih ke teknologi dan memanfaatkan platform e-commerce guna memperluas akses pasar mereka.

e. Peningkatan Infrastruktur untuk UMKM

Kebijakan fiskal juga dimanfaatkan untuk memperkuat infrastruktur yang mendukung pertumbuhan UMKM, seperti platform digital, sistem logistik, dan akses ke pasar global. Dengan kebijakan fiskal yang mendukung pembangunan infrastruktur, UMKM dapat menekan biaya produksi dan distribusi, serta memiliki kesempatan lebih luas untuk bersaing di pasar internasional.

Kendala-kendala Dalam Implementasi Kebijakan Fiskal Bagi Sektor UMKM

Implementasinya, kebijakan fiskal dan moneter di Indonesia tidak lepas dari berbagai hambatan dan tantangan. Salah satu hambatan utama dalam kebijakan fiskal adalah keterbatasan anggaran yang disebabkan oleh rendahnya penerimaan pajak dan tingginya kebutuhan pembiayaan pembangunan. Hal ini diperparah oleh inefisiensi pengelolaan anggaran dan kebocoran dalam sistem keuangan negara. Di sisi lain, kebijakan moneter sering kali dihadapkan pada tantangan dalam menyeimbangkan antara kebutuhan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan menjaga stabilitas harga. Fluktuasi nilai tukar rupiah dan perubahan kondisi ekonomi global juga memberikan tekanan tambahan terhadap kebijakan moneter di Indonesia.

a. Minimnya Sosialisasi dan Pencerahan tentang Teknologi

Banyak pelaku UMKM, khususnya di wilayah terpencil, tidak sepenuhnya mengerti kebijakan yang ada. Kurangnya akses informasi membuat banyak dari mereka tidak

memanfaatkan insentif yang telah disediakan. Selain itu, keterbatasan akses internet dan rendahnya literasi digital menghalangi mereka untuk mengakses platform perpajakan daring dan memanfaatkan insentif yang tersedia.

b. Birokrasi Rumit dan Ketidaksetaraan Akses

Prosedur pengajuan insentif sering kali dianggap sulit oleh para pelaku usaha kecil. Persyaratan administrasi yang bertingkat menjadi kendala, khususnya untuk sektor informal yang sebagian besar tidak memiliki legalitas usaha. Selain itu, UMKM yang telah terdaftar dan memiliki akses digital lebih gampang memperoleh manfaat insentif dibandingkan sektor informal, yang mengakibatkan ketidaksetaraan antara kelompok usaha yang lebih terstruktur dengan yang bersifat tradisional.

c. Kendala Sumber Daya Manusia dan Fasilitas

Keadaan sumber daya manusia UMKM yang masih kesulitan dalam memahami penerapan insentif pajak, serta sulitnya menyusun laporan realisasi dan akses teknologi ke alamat DJP online, menjadi tantangan yang signifikan. Di samping itu, kurangnya pemahaman mengenai perubahan sistem pembayaran dan penurunan tarif pajak juga berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak UMKM.

d. Keterbatasan Budget dan Pengawasan

Pemberian insentif yang meluas memerlukan alokasi dana yang signifikan. Di saat krisis, pemerintah mengalami kekurangan sumber daya, sehingga penyaluran bantuan sering kali tidak merata. Selain itu, pengawasan yang ketat diperlukan untuk memastikan bahwa insentif yang diberikan benar-benar mengenai sasaran dan tidak disalahgunakan.

e. Partisipasi Pemerintah dan Organisasi UMKM

Keberhasilan pelaksanaan kebijakan fiskal juga dipengaruhi oleh partisipasi aktif pemerintah dan asosiasi UMKM. Bantuan dari kedua pihak dapat memperkuat pemahaman dan keterlibatan para pelaku UMKM dalam menggunakan kebijakan yang tersedia

4. KESIMPULAN

Kebijakan fiskal memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Melalui instrumen belanja pemerintah dan perpajakan, kebijakan fiskal dapat memberikan jolt langsung maupun tidak langsung kepada sektor UMKM. Bentuk dukungan ini mencakup pemberian insentif pajak, subsidi, akses pembiayaan, serta pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah dari pelaku UMKM.

Dengan kebijakan fiskal yang tepat sasaran, pemerintah dapat menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif, meningkatkan daya saing, memperluas pasar, dan memperkuat ketahanan UMKM dalam menghadapi tantangan ekonomi. Hal ini pada akhirnya akan mendorong kontribusi UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agusta, R. (2014). Ketimpangan ekonomi dan urgensi kebijakan fiskal progresif di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Nasional*, 6(2), 91–103.
- Ananda, L. (2020). Pengaruh corporate governance, ukuran perusahaan, dan leverage terhadap integritas laporan keuangan. *Journal of Business and Economics (JBE) UPI YPTK*, 5(3), 8–14.
- Azizah, N., Hasanah, R., & Widodo, T. (2024). Pendekatan Islam dalam kebijakan fiskal untuk pemerataan kesejahteraan. *Jurnal Ekonomi Syariah dan Kebijakan Publik*, 12(1), 45–58.
- Budiarso, A. (2023). Kebijakan fiskal strategis untuk memperkuat sektor UMKM pasca pandemi. *Jurnal Kebijakan Fiskal Indonesia*, 14(3), 70–85.
- Gustira, T. (2024). Dampak kebijakan perpajakan terhadap UMKM: Antara peluang dan tantangan. *Jurnal Fiskal dan UMKM*, 6(2), 102–115.
- Hakim, A. (2019). Kendala klasik UMKM dalam mengakses perbankan dan solusi alternatifnya. *Jurnal Perbankan dan Usaha Mikro*, 4(2), 76–88.
- Handayani, R. (2024). Kontribusi UMKM terhadap perekonomian worldwide dan nasional. *Jurnal Ekonomi Mikro dan Inklusif*, 9(1), 25–40.
- Irmawati, R., Santosa, D., & Nugroho, A. (2013). Peran UMKM dalam pemulihan ekonomi daerah pasca krisis. *Jurnal Ekonomi Daerah*, 5(2), 89–102.
- Maria, A. (2015). Pengaruh CAR, BOPO, NIM, NPL, dan LDR terhadap ROA: Studi kasus pada 10 bank terbaik di Indonesia periode 2007–2011. *Calyptra*, 4(1), 1–19.
- Maulidah, L., & Oktafia, D. (2020). Kebutuhan lembaga keuangan berbasis komunitas bagi pelaku UMKM. *Jurnal Kewirausahaan dan Ekonomi Rakyat*, 8(3), 45–58.
- Muheramtohad, S. (2017). Karakteristik UMKM dan implikasi terhadap strategi pendanaan. *Jurnal Ekonomi Mandiri*, 3(1), 112–125.
- Muttaqin, A., Lestari, D., & Firmansyah, H. (2020). Peran sistem pembiayaan dalam menunjang keberlanjutan UMKM di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Terapan*, 7(1), 55–68.
- Oktafia, D. (2017). Tantangan pengembangan UMKM di Indonesia: Akses modular dan pengelolaan usaha. Bandung: CV Wirausaha Nusantara.

- Priyono, M. (2022). *Pendekatan holistik dalam penanggulangan kemiskinan di Indonesia*. Jakarta: Lembaga Kajian Pembangunan Nasional.
- R., Hidayat, T., & Lazuardi, M. (2022). Peran kebijakan fiskal dalam pemulihan UMKM pasca pandemi COVID-19. *Jurnal Sosio-Ekonomika Nasional*, 10(2), 56–71.
- Tambunan, T. (2008). *UMKM di Indonesia: Isu, perkembangan, dan arah kebijakan*. Jakarta: LP3ES.
- Utomo, S. (2020). Dampak kebijakan fiskal terhadap perkembangan UMKM di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Usaha Mikro*, 8(2), 134–149.